

SOSIALISASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU



Disiapkan oleh
DR. Agus Setyarso



MULTISTAKEHOLDER
FORESTRY
PROGRAMME

DFID

Department for
International
Development



KEHATI



Pengantar

Sebagai suatu program nasional yang secara langsung berdampak pada berbagai kesepahaman dan kesepakatan perdagangan internasional, sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) atau dengan nama lain memerlukan instrumentasi pendahuluan untuk dapat diterapkan, yakni jangkauan pemahaman pada masyarakat luas. Jangkauan tersebut mencakup lintas sektor di tingkat nasional, lintas tingkat pemerintahan, serta lintas pihak. Sosialisasi menjadi langkah awal yang tidak dapat ditinggalkan.

Di sisi lain, SVLK mempunyai karakter yang baku, standar, dan teknis. Ini tidak mudah untuk difahami oleh mereka yang kurang biasa berhadapan langsung dengan operasi usaha kehutanan di lapangan. Manakala sosialisasi tidak dirancang dan diselenggarakan dengan efektif, dampaknya bukan saja menyia-nyaiakan dana, tenaga, keahlian, dan waktu, tetapi berpotensi juga menimbulkan sikap kontra-produktif.

Suatu panduan yang memberikan rambu-rambu agar efektivitas sosialisasi dapat ditingkatkan, dicoba dikemas melalui dokumen ini. Dokumen ini disusun berbasis pengalaman sosialisasi SVSK yang telah dilakukan pada kurun tahun 2008 sampai dengan awal 2009, dilengkapi dengan pengalaman perancangan kurikulum dari penyusun. Penyelenggara program sosialisasi, para fasilitator, narasumber, maupun pihak-pihak yang terkait dengan implementasi SVSK dapat memanfaatkan substansi dokumen ini menurut kebutuhan masing-masing.



1. Pendahuluan

Latar belakang

Pada pertemuan tingkat menteri yang berkaitan dengan kehutanan di Bali pada tahun 2001, telah dihasilkan suatu deklarasi yang berisi komitmen negara-negara untuk bersama-sama melakukan upaya penanggulangan *illegal logging* dan perdagangan kayu yang diperoleh secara ilegal. Deklarasi Bali mengamanatkan negara-negara untuk merealisasikan tindak lanjut, baik di tingkat nasional, regional, maupun di dalam bentuk kerjasama bilateral dan multi-lateral.

Salah satu tindak lanjut yang diinisiasi Indonesia adalah merumuskan standar legalitas kayu secara nasional dan daripadanya dibangun sistem verifikasi independen dan kredibel untuk mengidentifikasi kayu-kayu legal dari yang diperoleh dari cara-cara yang tidak legal. Definisi legalitas kayu dan standar yang berintikan prinsip, kriteria dan indikator legalitas kayu disusun melalui proses panjang multipihak, sejak tahun 2003 sampai dengan 2008. Sejak tahun 2007 standar legalitas dirancang untuk dioperasikan melalui sistem tertentu, yang dinamakan sistem penjaminan legalitas kayu, yang kemudian disebut sebagai sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), yang sempat diubah oleh Pemerintah menjadi sistem verifikasi sahnya kayu (SVSK).

Untuk mendapatkan kondisi pemungkin dan tingkat kesiapan para pihak dalam implementasi SVLK/SVSK, penyampaian kembali sistem ini kepada masyarakat atau para pihak, perlu dilakukan sosialisasi yang efektif.

Rationale

Sambil menunggu keputusan pemerintah untuk penetapan bentuk akhir penyelenggaraan SVLK/SVSK, telah dilakukan sosialisasi kepada para pihak di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai suatu sistem yang terstandarkan, sosialisasi tidak dapat dilakukan sebagaimana umumnya pada pendekatan penyampaian pesan-pesan publik. Sosialisasi perlu dilakukan secara sistemik. Berbasis pada serangkaian pengalaman tindak sosialisasi terdahulu, suatu penyempurnaan kerangka, pendekatan dan kurikulum sosialisasi diharapkan dapat dirumuskan.

Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara sosialisasi SVLK/SVSK agar dapat diperoleh hasil dan dampak yang lebih besar bagi peserta sosialisasi maupun jejaring masing-masing.



2. Hasil pembelajaran dari Penyelenggaraan Sosialisasi 2008-2009

Mendahului penyiapan naskah pedoman ini, suatu dokumen yang berisi dinamika dan hasil pembelajaran dari tindak sosialisasi yang dilakukan pada masa 2007-2009 (awal) telah disusun. Pokok-pokok hasil pembelajaran dan rekomendasinya adalah sebagai berikut:

Pembelajaran

- Pada program sosialisasi SVLK/SVSK, ragam peserta cukup besar, dan ini mengakibatkan tingkat pembelajaran di antara peserta juga terbatas. Secara kasar dapat diduga tingkat penyerapan informasi dan pengetahuan seputar konteks dan materi antara 10 sampai dengan 60%
- Pada sosialisasi yang bersifat konsultasi publik di dalam proses penyiapan SVLK/SVSK, yang dilakukan secara serial, kehadiran peserta yang berbeda selalu mengakibatkan proses sosialisasi diulang dari awal sebelum para peserta mampu merefleksikan materi yang diperlukan untuk penyempurnaan sistem tersebut.
- Tidak ada rancangan pemilihan peserta sesuai dengan tujuan sosialisasi, yang mengakibatkan banyak kehilangan dalam rantai *transfer of information* sebaliknya peserta ke lembaga masing-masing.
- Kurikulum dan fasilitator sosialisasi belum dirancang mengikuti kerangka kurikulum tertentu, yang mengakibatkan koherensi dan harmonisasi kurikulum dan penyampaiannya tidak sepenuhnya mencapai tingkat pembelajaran yang semestinya.
- Target minimal sosialisasi pada umumnya tercapai, yakni penerimaan informasi awal mengenai konteks sertifikasi, verifikasi hutan dan posisi monitoring, tetapi nampaknya akan berhenti sebagai pemahaman individual, bukan pemahaman organisasional di lembaga tempat para peserta bekerja atau melakukan kegiatan

Rekomendasi berbasis hasil pembelajaran

- a. Untuk kepentingan diseminasi, maka tujuan sosialisasi, pemilihan peserta, kurikulum, dan penyelenggaraannya menjadi penting.
 - Sosialisasi dapat dimengerti sebagai proses pembelajaran mengenai sistem, teknologi/artefak atau budaya “lain” dan bagaimana dapat bekerja/hidup dengan itu. Bagi individu, proses pembelajaran tersebut mengantarkan pada ketrampilan dan sikap untuk menyesuaikan diri. Bagi masyarakat atau lembaga, sosialisasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kinerja masyarakat atau lembaga yang bersangkutan.



- Tujuan sosialisasi hendaknya diarahkan pada tipe *secondary socialization*, yakni proses pembelajaran yang menghasilkan pemahaman mengenai apa yang kemudian sebaiknya dilakukan oleh individu dan kemudian lembaga tempat individu yang bersangkutan melaksanakan kegiatannya, setelah menjalani program sosialisasi.
- Idealnya peserta dipilih berbasis kombinasi dari dua karakter sebagai berikut:
 - Peserta dipilih dari individu yang secara administrasi-birokrasi menempati jabatan yang memungkinkan yang bersangkutan menyebar-luaskan informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama lokaltatih
 - Peserta dipilih dari individu yang mempunyai kapasitas kepemimpinan, yang mampu mencari terobosan individual untuk penyebarluasan informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama lokaltatih kepada konstituen potensialnya.
- Sosialisasi/Diseminasi sebaiknya diawali dengan pemetaan peserta, yang dapat ditempuh melalui pengenalan singkat mengenai identitas diri dan lembaga, misi lembaga dan pengalaman di antara peserta, serta harapan peserta menyangkut sosialisasi atau lokaltatih mengenai SVLK/SVSK
- Pendekatan kurikulum sosialisasi hendaknya disesuaikan dengan mayoritas "warna" peserta, yang menghasilkan sosialisasi berbasis "*fixed*" *information, sequential* (pemberian materi tahap demi tahap), dan perpaduan antara penyampaian formal maupun komunikasi informal.
- Baik pada sosialisasi maupun lokaltatih perlu dimulai dengan sosialisasi, diskusi pada tataran kontekstual, belum langsung masuk pada materi teknis.
- Pada akhir sosialisasi hendaknya dapat diberikan kuis untuk menangkap hal-hal berikut:
 - refleksi pembelajaran selama mengikuti sosialisasi
 - refleksi rencana tindak lanjut individual setelah mengikuti sosialisasi
- Peran masyarakat madani/*civil society* di dalam implementasi SVLK/SVSK sangat penting. Oleh karenanya, kelompok LSM dihimbau untuk menindaklanjuti sosialisasi dengan diskusi periodik, *shared learning*, pertukaran informasi, dan advokasi untuk mengurangi tekanan dan kendala birokrasi. CFs dapat diminta bantuan untuk melakukan fasilitasi tindak lanjut tersebut.



3. Konteks sosialisasi

Sosialisasi SVLK/SVSK berada pada konteks proses pembelajaran mengenai sistem dan implementasi sistem verifikasi yang menyangkut keabsahan kayu di Indonesia. Keabsahan kayu sendiri dapat diperiksa pada sisi pengelolaan dan penebangan hutan, pemindah-tanganan, transportasi, maupun industri pengolahan kayu. Dengan demikian, peserta sosialisasi memerlukan identifikasi diri pada konteks yang menyangkut:

- Sistem dan dinamika sektor dan pengelolaan hutan di Indonesia, baik pada hutan negara maupun hutan hak
- Sistem penatausahaan hasil hutan
- Sistem dan dinamika pabrik pengolahan hasil hutan
- Sistem perdagangan dan transaksi kayu, baik domestik maupun internasional

Pada kisi kontekstual yang lain, hendaknya diingat bahwa pembelajaran adalah proses mental berkenaan dengan perubahan pikir, tindakan dan sikap sebagai hasil pengalaman kognitif maupun empirik. Pada ranah SVLK/SVSK pembelajaran ini hendaknya ditaruh pada situasi pembelajaran berorientasi pengembangan diri (*people-centred*) dan kepemimpinan (*leadership*), karena diharapkan para peserta sosialisasi dapat menularkan hasil pembelajarannya kepada lembaga dan atau konstituen masing-masing. Sebagaimana temuan pada hasil pembelajaran sosialisasi yang terdahulu, konstituen dan lembaga peserta sangat beragam dan ini menjadi tantangan diseminasi-diri yang berat bagi para peserta.

4. Kerangka dan pendekatan kurikulum sosialisasi

4.1. Hierarkhi

Sosialisasi diperlukan baik pada tingkat nasional, regional/propinsi, maupun di tingkat local (kabupaten dan organisasi/lembaga)

National

Sosialisasi SVLK/SVSK di tingkat nasional lebih bersifat *political socialization*. Ketika para peserta diharapkan mewakili instansi dan lembaga dengan jejaring nasional dan bahkan internasional, maka muatan pesan-pesan politik dan kebijakan yang terkandung di dalam konteks SVLK/SVSK mempunyai proporsi lebih besar daripada muatan teknis dan procedural. Pesan-pesan diseminasikan melalui pertanyaan kunci berikut ini:



- Seberapa jauh jangkauan paradigma, nilai dan prinsip SVLK/SVSK dapat ditransformasikan ke jejaring masing-masing peserta?
- Seberapa jauh jangkauan paradigma, nilai dan prinsip SVLK/SVSK dapat memunculkan inisiatif kebijakan baru pada masing-masing instansi/lembaga peserta?
- Seberapa jauh jangkauan paradigma, nilai dan prinsip SVLK/SVSK mampu memperkuat harmonisasi kebijakan antar instansi/lembaga peserta?

Regional/local

Sosialisasi SVLK/SVSK di tingkat sub-nasional atau regional dan lokal lebih bersifat *cultural socialization*. Ketika para peserta diharapkan mewakili instansi dan lembaga dengan persoalan implementasi di lapangan, maka muatan pesan-pesan cultural, teknis dan procedural yang terkandung di dalam konteks SVLK/SVSK mempunyai proporsi lebih besar daripada muatan politik dan kebijakan. Pesan-pesan diseminasikan melalui pertanyaan kunci berikut ini:

- Seberapa jauh jangkauan standar legalitas/keabsahan kayu, terutama pada level criteria, indicator dan verifier mempunyai relasional dengan system legal yang melekat pada instansi/lembaga masing-masing peserta?
- Seberapa jauh prosedur pelaksanaan SVLK/SVSK dapat berdampak dan bahkan memperkuat peran masing-masing instansi/lembaga peserta?
- Seberapa jauh pelaksanaan SVLK/SVSK mampu memperkuat harmonisasi tata-hubungan kerja antar instansi/lembaga peserta?

4.2. Aktor

Paling kurang, kerangka kurikulum mampu mendeskripsikan profil lembaga penyelenggara sosialisasi, kompetensi fasilitator dan nara sumber, kapasitas-posisi-pengalaman peserta, dan jejaring serta konstituen peserta yang menjadi sasaran akhir diseminasi sebagai aksi lanjutan sosialisasi. Para aktor yang terkait langsung pada agenda sosialisasi secara bersama-sama harus mampu menyiapkan lingkungan sosialisasi yang bersifat *people-centered* dan *leadership-type learning process*.

4.3. Bangun kurikulum

Bangunan kurikulum disusun secara proporsional sesuai dengan hierarkhinya. Secara umum bangun kurikulum tersusun atas materi inti, materi major, dan materi minor. Jika dirasa perlu, dapat ditambahkan materi tasking. Periksa Tabel 1 untuk deskripsi kategorikal.



Materi	Sosialisasi Tingkat nasional	Sosialisasi tingkat sub-nasional	Proporsi (persen)
Inti	Konteks politik dan Kebijakan Kehutanan	Konteks kebijakan penanggulangan illegal logging dan perdagangan kayu ilegal	20
Major	Politik dan kebijakan SVLK/SVSK	Kebijakan SVLK/SVSK	30
Minor	Kontekstualisasi SVLK/SVSK lintas sektor dan lintas lembaga	Sistem, Standard, Prosedur SVLK/SVSK	30
Tasking	Capita selekta SVLK/SVSK	Dinamika implementasi SVLK/SVSK	20

5. Tujuan, Materi Kurikulum dan Silabi

Tujuan sosialisasi SVLK/SVSK adalah menghasilkan pemahaman mengenai konteks dan sosok SVLK/SVSK yang kemudian diikuti oleh inisiatif tindak lanjut yang mencakup tindak bersama ataupun diseminasi ke jejaring yang lebih luas. Tujuan tersebut, menurut hierarki sosialisasi, dicapai melalui materi dan silabi sebagai berikut:

Konteks politik dan Kebijakan Kehutanan: konvensi dan forum diplomasi internasional mengenai kehutanan, politik dan kebijakan kehutanan nasional, dampak *illegal logging* dan perdagangan kayu pada sektor kehutanan dan pembangunan ekonomi nasional, posisi para pihak di dalam konteks politik dan kebijakan kehutanan

Politik dan kebijakan SVLK/SVSK: ekonomi politik dan ekologi politik di kehutanan; dampak negatif ekonomi politik dan ekologi politik - kehilangan dan kerusakan sumberdaya hutan dan ekosistemnya; perkembangan kejahatan kehutanan, perdagangan hasil hutan ilegal, dan efektivitas penanggulangannya; konvensi internasional dalam konteks penanggulangan *illegal logging* dan perdagangan hasil hutan ilegal; sistem hukum dan dinamika penegakan hukum di kehutanan; pentingnya SVLK/SVSK sebagai instrumen pencapaian tata-keperintahan kehutanan yang baik (*good forestry governance*)



Kontekstualisasi SVLK/SVSK lintas sektor dan lintas lembaga: dukungan legislatif untuk tata-kemerintahan kehutanan yang baik melalui SVLK/SVSK; perspektif SVLK/SVSK dari sisi penegakan aturan dan hukum; perspektif SVLK/SVSK dari sisi kebijakan industri, perspektif SVLK/SVSK dari sisi kepabeanaan dan perdagangan internasional; perspektif SVLK/SVSK dari sisi pemerintahan daerah; dukungan kelompok masyarakat madani (CSO: *civil society organisations*) untuk SVLK/SVSK

Capita selekta SVLK/SVSK: diskusi kelompok terfokus untuk (i) tindak kebijakan bersama (*joint policy measures*); (ii) *piloting*

Konteks kebijakan penanggulangan illegal logging dan perdagangan kayu ilegal: Sumberdaya hutan dan ekosistemnya, kehilangan dan kerusakan sumberdaya hutan dan ekosistemnya, perkembangan kejahatan kehutanan, perdagangan hasil hutan ilegal, dan efektivitas penanggulangannya; kebijakan diplomasi internasional dalam konteks penanggulangan *illegal logging* dan perdagangan hasil hutan ilegal, sistem hukum dan dinamika penegakan hukum di kehutanan

Kebijakan SVLK/SVSK: SVLK/SVSK pada konteks tata-keperintahan kehutanan yang baik; SVLK/SVSK pada konteks perdagangan kayu internasional (Eropa, Amerika, Jepang, China, Malaysia); Kebijakan sertifikasi kehutanan; SVLK/SVSK sebagai kebijakan verifikasi hasil hutan yang *mandatory*

Sistem, Standard, Prosedur SVLK/SVSK: proses perumusan standar legalitas kayu; struktur standar legalitas; struktur dan fungsi kelembagaan SVLK/SVSK; prosedur implementasi SVLK/SVSK

Dinamika implementasi SVLK/SVSK: kompleksitas implementasi SVLK/SVSK pada kawasan hutan negara, kawasan hutan hak, non kawasan hutan, transportasi, perdagangan dan industri kehutanan; kompleksitas isu hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah daerah, unit bisnis, dan LSM



6. Penyelenggaraan sosialisasi

A. Penyusunan undangan peserta sosialisasi

Sejauh mungkin peserta dipilih dari individu yang secara administrasi-birokrasi menempati jabatan yang memungkinkan yang bersangkutan menyebar-luaskan informasi dan pengetahuan di instansi/lembaga masing-masing, dan atau individu yang mempunyai kapasitas kepemimpinan, yang mampu mencari terobosan individual untuk penyebar-luasan informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama sosialisasi kepada konstituen atau jaringan yang lebih luas

B. Pemetaan peserta sosialisasi

Sosialisasi/Diseminasi diawali dengan pemetaan peserta, yang dapat ditempuh melalui pengenalan singkat mengenai identitas diri dan lembaga, misi lembaga dan pengalaman di antara peserta, serta harapan peserta menyangkut sosialisasi SVLK/SVSK

C. Penetapan fasilitator dan narasumber

- Fasilitator selain memelihara dinamika kelompok harus mempunyai pemahaman yang cukup mengenai kebijakan dan pengelolaan hutan, penatausahaan kayu, dan perdagangan hasil hutan. Di samping itu, untuk sosialisasi hendaknya dipilih fasilitator yang senior.
- Nara sumber harus mampu menyiapkan pemahaman dan paparan yang bernas mengenai materi yang diamankan kepadanya.
- Fasilitator dan narasumber melakukan pertemuan untuk harmonisasi pelayanan sosialisasi yang selaras dengan hasil pemetaan peserta.

D. Penyiapan lingkungan pelaksanaan sosialisasi

Lingkungan pelaksanaan sosialisasi dihindari dari kesan formal, sehingga tidak menimbulkan pengaruh tekanan apapun pada peserta. Ruang mungkin dapat dikombinasikan dengan ruang terbuka. Di dalam ruangan hendaknya diperhatikan mengenai suhu udara, pencahayaan, kenyamanan duduk dan bergerak, serta ukuran layar paparan.

E. Penyiapan sarana dan prasarana

Penyelenggara sosialisasi berkonsultasi dengan fasilitator dan narasumber untuk membahas kebutuhan sarana dan prasarana sosialisasi, sesuai dengan hasil pemetaan peserta dan dinamika sosialisasi.



F. Pelayanan penyelenggaraan sosialisasi

- Pelaksanaan disesuaikan dengan mayoritas "warna" peserta, yang menghasilkan sosialisasi berbasis "fixed" information, sequential (pemberian materi tahap demi tahap)
- Teknik sosialisasi merupakan perpaduan antara penyampaian formal maupun komunikasi informal.
- Penyelenggara diminta selalu siap untuk melayani improvisasi agenda dan teknik sosialisasi

4. Evaluasi

Pada akhir sosialisasi hendaknya dapat diberikan kuis untuk menangkap hal-hal berikut:

- a. refleksi pembelajaran selama mengikuti sosialisasi
- b. refleksi rencana tindak lanjut bersama maupun individual setelah mengikuti sosialisasi

5. Penutup

Persoalan kehutanan dan juga SVLK/SVSK selalu berwatak multi-dimensional serta selalu ada unsur kekuranglengkapan pemahaman dan pengetahuan, dan oleh karenanya kurikulum untuk sosialisasinya harus dirancang sesuai dengan watak tersebut. Peserta mungkin sekali belum siap untuk menerima informasi yang detil dan dalam. Di sisi lain, diharapkan peserta menjadi *agent of dissemination* melalui jalur birokrasi maupun jalur kepemimpinan yang dimilikinya. Di samping kurikulum yang disiapkan dengan aksentuasi yang spesifik, metoda dan teknik penyelenggaraan sosialisasi menjadi ruang inovasi bagi fasilitator dan narasumber yang menantang.

